

PERAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR

Annisa Nurmahdalena¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Penyuluh Keluarga Berencana dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling dan Accidental Sampling*, sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pertanyaan sesuai dengan fokus penelitian, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara seperti catatan yang telah tersusun dalam arsip atau buku pedoman. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications*.

Hasil penelitian dari Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir adalah berjalan kurang baik karena masih terdapat banyak masyarakat yang kurang mengerti pentingnya KB dan kinerja dari PKB yang belum maksimal. Faktor penghambat Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir dalam masih kurangnya sosialisasi penyuluh KB kepada masyarakat, belum adanya kerjasama antara PKB dan pemerintah dalam anggaran dana untuk program KB.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Peran, Penyuluh Keluarga Berencana

Pendahuluan

Latar Belakang

Masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia pada umumnya yakni jumlah penduduk yang

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: nissaniss18@gmail.com

besar, pertumbuhan yang tinggi, persebaran tidak merata, dan kualitas rendah. Untuk mengatasi masalah perkembangan bidang kependudukan, perlu adanya suatu peraturan dan kebijakan pemerintah. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik harus diimbangi dengan peraturan pertumbuhan jumlah penduduk melalui keberhasilan program keluarga berencana yang harus dilaksanakan, karena jika program tersebut tidak terlaksana dengan baik akan mengakibatkan laju penduduk yang tidak seimbang.

Permasalahan sangat kompleks dan berkaitan satu sama lain sehingga mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi tidak seimbang, permasalahan tersebut terurai seperti di suatu daerah dan kota-kota besar, umumnya masih sangat banyak masyarakat yang kurang memahami penting program Keluarga Berencana Nasional. Jika ditelaah secara lebih mendalam permasalahan kependudukan di suatu daerah dapat terurai seperti, ketika penduduknya semakin banyak karena tingkat pendudukan yang semakin tinggi dan rendahnya kesadaran masyarakat akan Program KB, daerah tersebut akan mengalami sebuah kondisi di mana penduduk akan sangat padat, ketika penduduk sangat padat dan tidak diimbangi dengan aspek mobilitas yang baik misalnya seperti aspek kesehatan, aspek ekonomi dan bahkan lapangan kerja yang terbatas tentunya akan mengakibatkan kemiskinan dan bahkan lebih dari itu masyarakat akan hidup dengan kondisi yang tidak kondusif kedepannya.

Salah satu program BKKBN dalam meningkatkan kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam Keluarga Berencana adalah melalui Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang terdapat di Kelurahan. PKB berperan penting sebagai pengelola, penggerak, memberdayakan serta memberikan pendekatan kepada masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang ikut ambil dalam pelaksanaan program KB. Dalam praktiknya PKB menemukan banyak permasalahan di lingkungan masyarakat. Permasalahan umum yang sering dijumpai adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB dengan baik.

Di Kelurahan Sungai Dama masih sering dijumpai keluarga yang memiliki anak lebih dari dua, hal ini sangat bertolak belakang dengan visi yang diusung oleh Pemerintah dalam Program Keluarga Berencana Nasional yaitu “dua anak cukup”.

Peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengikuti Program KB Nasional untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir ini tentu tidak terlepas dari peran Penyuluh Keluarga Berencana dalam memberikan advokasi ke pemerintah Kecamatan dan KIE ke masyarakat tersebut. PKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini akan membahas Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat jadi proses pembelajaran dan berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi masukan bagi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam meningkatkan peserta KB-baru.

Teori dan Konsep

Pengertian Peran

Peranan di defenisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus (Merton dalam Raho, 2007:67). Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2013:243) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

Penyuluh Keluarga Berencana merupakan ujung tombak pengelola KB dilini lapangan. Undang-Undang Republik Indonesia No 52. Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, agar amanat tersebut dapat terimplementasikan perlu ditetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Salah satu NPSK sesuai Undang-Undang RI No 52 Tahun 2009 adalah Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Daerah, hal ini telah sesuai dengan pasal 38 yakni di BKKBN ditetapkan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan.

Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Keluarga Berencana Nasional.

Fungsi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

- a. Wakil BKKBN Kabupaten/Kotamadya di tingkat Kecamatan.
- b. Pembantu teknis camat sebagai penanggung jawab operasional program KB Nasional di tingkat kecamatan.
- c. Atasan langsung dari PKB dan staf PKB.

Sepuluh Langkah Kerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)

Selain mengetahui dan memenuhi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tersebut maka yang wajib harus diketahui oleh PKB/PLKB adalah 10 (sepuluh) langkah kerja, antara lain :

1. Pendekatan tokoh formal
2. Pendekatan tokoh informal
3. Pendataan dan pemetaan
4. Pembentukan kesepakatan
5. Penegasan kesepakatan
6. Penerangan dan motivasi
7. Peneladanan/pembentukan grup pelopor
8. Pelayanan teknis
9. Pembinaan
10. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi

Tugas PKB

1. Perencanaan PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan.
2. Pengorganisasian Tugas PLKB di bidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program KB Nasional. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahun dan ketrampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan yang ada.
3. Pelaksana dan Pengelola Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai penyiapan IMP dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program KB Nasional di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.
4. Evaluasi dan Pelaporan Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan program KB Nasional sesuai dengan sistem pelaporan yng telah ditentukan secara berkala.

Keluarga Berencana

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam pasal 1 disebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengatur kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Keluarga Berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga (Hartanto, 2004:27).

Tujuan dan Sasaran Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran dari program KB, berdasarkan BKKBN (2005:20) adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu, bayi dan anak, serta penanggulangan masalah

- kesehatan reproduksi.
- b. Peningkatan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga untuk mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.
 - c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia penduduk berdasarkan siklus hidup yaitu mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan lanjut usia. Dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.
 - d. Pembinaan kemandirian dan peningkatan cakupan dan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarakan oleh instansi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk tingkat global (dunia), pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua peristiwa kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami. Pada lingkup yang lebih kecil, misalnya ditingkat negara, pertumbuhan penduduk dipengaruhi pula oleh imigrasi penduduk ke dan keluar dari suatu negara (Noveria Mita, 2011:5).

Disebutkan pula pada Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Dinamika Kependudukan

Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Hal-hal yang diperlukan dalam pengukuran dinamika kependudukan adalah:

1. Indikator
 - a. Jumlah penduduk

- b. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, umur, suku, bangsa, pendidikan, agama, pekerjaan dan lain-lain
 - c. Proses demografi yang mempengaruhi jumlah dan komposisi penduduk
2. Parameter
- a. Angka Absolut
 - b. Angka Relatif

Faktor Pertumbuhan Penduduk

- a. Kematian (Mortalitas)
- b. Kelahiran (Fertilitas)
- c. Migrasi

Pengertian Penduduk

Pengertian penduduk menurut beberapa para ahli adalah penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut oleh orang tersebut (Srijanti dan A. Rahman). Pengertian penduduk lainnya dikemukakan pula oleh pakar lainnya penduduk adalah orang matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu (Jonny Purba).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan tahapan untuk memberi batasan pengertian suatu istilah yang diperlukan dalam penelitian atau merupakan suatu unsur pokok dari suatu penelitian. Maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah peran penyuluh keluarga berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan melalui pelaksanaan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat guna penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas serta meningkatkan upaya kesejahteraan untuk mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang deskripsi atau suatu keadaan secara subyektif atau obyektif penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Fokus Penelitian

1. Peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana Dalam Menekan Pertumbuhan Penduduk dalam indikator:

- a. Pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB Nasional di desa/kelurahan.
 - b. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB Nasional di desa/kelurahan.
 - c. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan.
 - d. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB Nasional di desa/kelurahan
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir.

Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer : Merupakan data yang diperoleh dalam penelitian yang didapat dengan cara melakukan tanya jawab dan pengamatan secara langsung atau wawancara dan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian di persiapkan peneliti.
- b. Data Sekunder : data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain :
 1. Dokumen-dokumen, Laporan-laporan DKP, dan data kependudukan dari Kelurahan.
 2. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian.
 3. Internet.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan *Library Research* yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan *Field work Research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
 - a) Teknik Observasi
 - b) Teknik Wawancara

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*).

Keempat komponen ini saling mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan. Pertama-tama penulis melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data, karena data yang dikumpulkan banyak maka diadakan kondensasi data. Setelah kondensasi data dilakukan kemudian data disajikan, selain itu pengumpulan data juga

digunakan dalam penyajian data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian

Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Peran Petugas Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai penghubung dalam menangani permasalahan yang ada saat ini yaitu pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Penyuluh Keluarga Berencana juga berperan penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang Keluarga Berencana. Penyuluh KB merupakan salah satu komponen dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah.

Pengelola Pelaksana Program KB

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera membahas tentang Program Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. KB juga berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai dengan kemampuan. Perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan mereka dengan tujuan untuk menghindari beban ekonomi.

Pelaksanaan program KB ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa pelaksanaan program KB dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dilihat dari peran serta para kader dan lapisan masyarakat yang terlibat program KB sehingga dapat membantu dalam penambahan akseptor KB baru. Namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang mengetahui tentang pentingnya KB dan masalah anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan terhambatnya program KB.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran penyuluh KB dalam pengelola pelaksanaan program KB, berjalan dengan baik karena peran masyarakat yang turut membantu dalam pelaksanaan program tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Program KB

Pelaksanaan penggerak partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 pasal 35 dilakukan dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui

pembimbingan, pembinaan, pengarahan dan menggerakkan pihak lain. Dalam program kerjanya PKB tidak sendirian melakukan kegiatannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti program KB melalui sosialisasi-sosialisasi agar dapat terwujud keluarga yang berkualitas.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam program KB kurang, karena masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB ini yang mengharuskan penyuluh KB bekerja keras dalam mensosialisasikannya agar masyarakat ikut berpartisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran penyuluh KB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat program KB kurang, karena masih terdapat banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Program KB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 35 Ayat 3 mengatakan bahwa pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka meningkatkan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga khususnya keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.

Program KB bukan hanya terpaku kepada tujuan untuk menekan angka kelahiran, program KB tentunya memiliki tujuan dimana membuat para akseptornya menjadi lebih sejahtera, dengan akseptor mengikuti program KB, akseptor diajarkan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, guna kemajuan taraf hidup yang lebih layak agar menunjang perekonomian keluarga.

Pemberdayaan masyarakat harus digali berdasarkan potensi yang dimiliki oleh setiap akseptor. Usaha pemberdayaan bisa dimulai dari dukungan pihak luar dengan memfasilitasi berupa pelatihan, diskusi, pemberian teknologi, bantuan pemasaran, pendampingan usaha dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa peran penyuluh KB dalam pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, karena dalam pemberdayaan masyarakat tersebut akseptor KB terbantu dengan adanya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang membuat akseptor dapat hidup mandiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh KB dalam pemberdayaan masyarakat berjalan baik karena adanya program-program yang dapat membuat keluarga lebih sejahtera.

Mengembangkan Kemitraan dalam Program KB

Mengembangkan kemitraan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PKB dalam suatu daerah baru atau dalam mengembangkan kegiatan baru. Langkah ini merupakan kunci bagi langkah selanjutnya, karena dengan hubungan yang akrab dengan tokoh-tokoh masyarakat maupun pihak terkait permasalahan akan lebih mudah dipecahkan. Oleh karena itu mengembangkan kemitraan ini harus dimanfaatkan untuk penyampaian

informasi, berkonsultasi, meminta izin, meminta dukungan dan menyiapkan kesepakatan dengan penggarapan program kependudukan dan KB diwilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa dalam mengembangkan kemitraannya penyuluh sudah berusaha untuk memberikan pengertian tentang KB walaupun ada sebagian masyarakat yang tidak setuju tentang program KB.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di katakan bahwa peran penyuluh KB dalam mengembangkan kemitraan dalam program KB sudah cukup baik, walaupun ada sebagian masyarakat yang menentang.

Faktor Penghambat dalam Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Ada beberapa kendala yang penulis temukan dari hasil wawancara penulis dengan pihak PKB. Selain itu banyaknya faktor penghambat yang terjadi di lapangan juga menyulitkan bagi PKB, mengingat bahwa warga di suatu Kelurahan tidak sedikit. Penyuluh KB di Kelurahan Sungai Dama menyadari ada beberapa kendala-kendala yang menghambat proses pengendalian penduduk tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada Kelurahan Sungai Dama dalam pelaksanaan KB, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak adalah:

1. Penghambat pengelola pelaksanaan kegiatan Program KB, masih banyak warga yang sulit untuk diajak mengikuti program KB karena tidak mengetahui pentingnya KB dan anggaran dana yang kurang dari pemerintah.
2. Penghambat penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB, sifat individualisme yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi program KB dikarenakan jiwa sosialnya yang sudah mulai berkurang.
3. Penghambat pemberdayaan keluarga atau masyarakat dalam program KB, kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa suatu yang tidak menghasilkan uang itu tidak dianggap penting terlepas dari tujuan program KB ini sebenarnya untuk meningkatkan kualitas keluarga mereka.
4. Penghambat menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB, pemikiran sebagian masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang masih menganggap bahwa KB itu adalah suatu tindakan yang dilarang.

Kesimpulan

1. Pengelola pelaksanaan kegiatan program KB, penyuluh KB masih kurang dalam pelaksanaannya dilihat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun terutama yang disebabkan oleh kelahiran bayi.

2. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program KB, peran penyuluh KB kurang karena masih banyak warga yang tidak menyadari kegunaan dari berpartisipasi dalam program KB tersebut.
3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program KB, peran penyuluh KB sudah cukup baik dalam memberdayakan masyarakat terlihat dimana ada beberapa program yang di buat oleh program KB yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
4. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KB peran penyuluh KB masih kurang, ini terlihat dari masih kurangnya komunikasi dan pendekatan dengan beberapa tokoh agama.
5. Faktor penghambat dalam Peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk masih kurangnya sosialisasi PKB kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan KB.

Saran

1. Penyuluh KB diharapkan harus mampu bekerja sesuai tupoksi seorang PKB dimana PKB harus memiliki wawasan dan kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dengan masyarakat.
2. Sebaiknya PKB mampu bekerja sama dan kompak dengan para kader-kader dalam melakukan sosialisasi program KB di setiap RT. PKB harus mampu menjadi seorang yang mengantarkan pesan atau informasi secara efektif agar masyarakat dapat memahami dengan baik kegunaan dari KB sehingga pertumbuhan penduduk dapat di kendalikan.
3. Memaksimalkan kinerja PKB dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memberikan arahan-arahan sehingga masyarakat menyadari bahwa pemberdayaan itu harus dilakukan yang dapat membuat keluarga lebih sejahtera.
4. PKB harus mampu menjalin komunikasi dan pendekatan yang baik dengan para tokoh-tokoh masyarakat guna mengubah pola pikir tentang program KB itu sendiri sehingga dapat membantu dalam pengendalian pertumbuhan penduduk.

Daftar Pustaka

- Chilcote, Ronald H, 2004. *Teori Perbandingan Politik*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada
- FEUI, Demografi Lembaga, 2007. *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta; Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Hadari, Nawawi, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press
- Handayani, Sri, 2010. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta; Pustaka Rihama
- Hartanto, Hanafi, 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan

- Mantra, Ida Bagoes, 2010. *Demografi Umum*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy J, 2005. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung ; Remaja Rosda Karya
- Noveria, Mita, 2011. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*, Jakarta; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Pasolong, Hasibuan, 2012. *Metode Penelitian Manajemen Publik*. Bandung; Alfabeta
- Soekanto, Soerjono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung; Alfabeta
- Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung; CV Alfabeta
- Suyanto, Bagong, Sutinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta; Predana Media Group
- Syarief, Sugiri, 2007. *KB Untuk Semua*. Jakarta; Gramedia
- Todaro, P.M. & Smith S.C, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta; Erlangga

Dokumen-Dokumen:

- 2014, Peraturan Pemerintah RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga*
- 2010, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 Tentang *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)*
- 2009, Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*
- 1992, Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*